

Peran Pemerintah Kampung dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Yasa Mulya Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke

Susana Santy^{*1}, Nurlinda Yani², Rusniyati³

^{1,3}Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis Merauke

²Keuangan dan Perbankan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis Merauke

Corresponding Email*: Susansando78@gmail.com

<https://doi.org/10.61578/sege.1.1.1-9>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kampung Yasa Mulya dalam pemberdayaan masyarakat di Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 14 orang yang terdiri atas kepala kampung, sekretaris kampung, perangkat kampung, pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK), tokoh masyarakat/tokoh adat, serta masyarakat yang terlibat dalam program pemberdayaan. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa berperan sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator, yang berdampak pada peningkatan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Faktor pendukung seperti koordinasi aparat desa dan ketersediaan sumber daya lokal memperkuat keberhasilan program, sedangkan keterbatasan anggaran dan rendahnya partisipasi warga menjadi kendala utama. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat untuk menciptakan program pemberdayaan yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pemerintah Kampung; Pemberdayaan Masyarakat; Partisipasi; Kemandirian; Desa Agraris.

Abstract

This study aims to analyze the role of the Yasa Mulya Village Government in community empowerment in Tanah Miring District, Merauke Regency, South Papua. The study used a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. The research informants numbered 14 people consisting of the village head, village secretary, village officials, administrators of the Village Community Empowerment Institution (LPMK), community leaders/traditional leaders, and community members involved in the empowerment program. Data were analyzed using an interactive analysis model that includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that the village government plays a role as a regulator, dynamic agent, and facilitator, which has an impact on increasing the capacity, independence, and welfare of the community. Supporting factors such as coordination of village officials and the availability of local resources strengthen the program's success, while budget constraints and low community participation are the main obstacles. This study emphasizes the importance of collaboration between the village government and the community to create an effective, participatory, and sustainable empowerment program.

Keywords: Village Government; Community Empowerment; Participation; Independence; Agrarian Village.

1. Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan agenda penting dalam pembangunan nasional karena berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan, kemandirian, dan kapasitas masyarakat lokal. Desa sebagai unit pemerintahan terdepan memiliki posisi strategis dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengelola potensi wilayah, serta melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi setempat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul, dan potensi lokal. Dengan demikian, pemerintah desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kemampuan masyarakat agar mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri dan berkelanjutan. Sarman et al., (2025) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa berkaitan dengan pengembangan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya yang didukung oleh kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan. Dalam konteks ini, masyarakat perlu ditempatkan sebagai subjek pembangunan yang aktif, bukan sekadar penerima manfaat. Oleh karena itu, keberhasilan pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam membangun partisipasi, menyediakan fasilitas pendukung, dan mengarahkan program sesuai kebutuhan masyarakat.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran penting dalam keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Hermawan et al., (2021) menemukan bahwa pemerintah desa dapat mendorong pemberdayaan melalui program di bidang ekonomi, kesehatan, pertanian, pendidikan, dan kepemudaan. Nubu dan Mattalitti, (2021) juga menegaskan bahwa peran pemerintah desa sebagai pengambil keputusan, penyedia informasi, dan penggerak masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Sementara itu, Saefuloh et al., (2025), Takdir dan Wetapo, (2025) menunjukkan bahwa peran pemerintah desa sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat, melalui dukungan kebijakan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada identifikasi peran pemerintah desa secara umum dan belum banyak mengkaji bagaimana ketiga fungsi tersebut dijalankan secara terpadu dalam konteks wilayah agraris dengan karakteristik sosial masyarakat yang heterogen. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada keberhasilan program tanpa menjelaskan secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan maupun hambatan implementasi pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.

Permasalahan serupa juga ditemukan di Kampung Yasa Mulya Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke. Kampung ini memiliki potensi besar pada sektor pertanian karena mayoritas masyarakat menggantungkan mata pencaharian pada aktivitas pertanian. Namun demikian, berbagai program pemberdayaan yang telah dilaksanakan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sarana produksi pertanian, akses irigasi yang belum optimal, keterbatasan pupuk, rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, serta belum meratanya kegiatan pelatihan dan pendampingan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi lokal yang dimiliki dengan tingkat keberhasilan pemberdayaan yang dicapai. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana pemerintah kampung menjalankan fungsi

regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

Secara konseptual, peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat dapat dianalisis melalui tiga fungsi utama, yaitu regulator, dinamisator, dan fasilitator. Fungsi regulator berhubungan dengan kemampuan pemerintah kampung dalam menyusun kebijakan, peraturan, dan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fungsi dinamisator berkaitan dengan kemampuan pemerintah kampung dalam mendorong partisipasi, membangun kesadaran kolektif, serta memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Sementara itu, fungsi fasilitator mencerminkan kemampuan pemerintah kampung dalam menyediakan sarana, prasarana, akses informasi, pelatihan, serta pendampingan yang dibutuhkan masyarakat. Hubungan ketiga fungsi tersebut diyakini berpengaruh terhadap peningkatan kapasitas masyarakat, kemandirian ekonomi, serta kesejahteraan sosial masyarakat kampung. Dengan demikian, keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan ketiga fungsi pemerintah kampung tersebut secara simultan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat celah penelitian (research gap) yang perlu diisi, yaitu masih terbatasnya kajian yang mengkaji secara komprehensif peran pemerintah kampung sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat pada wilayah agraris di Kabupaten Merauke. Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dengan menganalisis keterkaitan ketiga peran tersebut dalam konteks Kampung Yasa Mulya yang memiliki karakteristik sosial ekonomi dan budaya yang khas. Selain mengidentifikasi bentuk peran pemerintah kampung, penelitian ini juga menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah kampung dalam pemberdayaan masyarakat di Kampung Yasa Mulya Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke melalui perspektif regulator, dinamisator, dan fasilitator. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pemberdayaan masyarakat desa sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah kampung dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah memahami fenomena pemberdayaan masyarakat secara holistik dan mendalam, serta menekankan pengalaman, persepsi, dan interaksi masyarakat dengan pemerintah desa (Ahmad et al., 2025; Maharani & Asmorowati, 2024; Wahyudin et al., 2023).

a. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, yang memiliki karakteristik sebagai wilayah agraris dengan mayoritas penduduk bekerja pada sektor pertanian. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Kampung	1
2	Sekretaris Kampung	1
3	Perangkat Kampung	2
4	Pengurus LPMK	2
5	Tokoh Masyarakat / Tokoh Adat	3
6	Masyarakat Peserta Program	5
Jumlah		14 Orang

Sumber: Olahan Data Primer, 2025.

Pemilihan informan dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: (1) memiliki keterlibatan langsung dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, (2) memahami kebijakan dan program kampung yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, serta (3) bersedia memberikan informasi secara terbuka selama proses penelitian berlangsung. Penggunaan teknik *purposive sampling* dimaksudkan agar data yang diperoleh berasal dari pihak-pihak yang benar-benar memahami fenomena yang diteliti sehingga mampu memberikan informasi yang mendalam dan relevan (Ahmad et al., 2025).

b. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik pengumpulan data yang saling melengkapi. Pertama, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan kepala desa, perangkat desa, tokoh adat, dan masyarakat yang menjadi informan kunci untuk memperoleh pemahaman tentang peran pemerintah desa serta pengalaman mereka dalam program pemberdayaan (Wahyudin et al., 2023). Kedua, observasi partisipatif dilakukan secara langsung terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, termasuk pelatihan pertanian, kegiatan ekonomi produktif, dan musyawarah desa, guna melihat interaksi nyata antara pemerintah desa dan Masyarakat (Maharani & Asmorowati, 2024). Selain itu, studi dokumentasi juga dilakukan dengan menelaah dokumen resmi pemerintah desa, laporan program pemberdayaan, notulen musyawarah, serta data statistik lokal yang berkaitan dengan demografi, ekonomi, dan partisipasi masyarakat, sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang fenomena yang diteliti.

c. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian utama adalah pedoman wawancara dan lembar observasi. Pedoman wawancara disusun berdasarkan indikator peran pemerintah desa sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator, sehingga pertanyaan dapat mengeksplorasi kebijakan, pelaksanaan program, dan kendala yang dihadapi.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengacu pada model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan transkripsi hasil wawancara, menyeleksi informasi yang relevan, memberikan kode (coding), serta mengelompokkan data ke dalam tema-tema penelitian yang berkaitan dengan peran pemerintah kampung sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Tahap selanjutnya adalah penyajian data (data display), yaitu menyusun hasil temuan dalam bentuk narasi deskriptif, matriks tematik, dan tabel sehingga hubungan antar kategori dapat dipahami secara sistematis. Setelah itu dilakukan penarikan

kesimpulan dan verifikasi dengan cara mengidentifikasi pola, keterkaitan antar tema, faktor pendukung, serta faktor penghambat pemberdayaan masyarakat. Kesimpulan yang diperoleh terus diverifikasi selama proses penelitian melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi serta keabsahan temuan penelitian (Maharani & Asmorowati, 2024).

e. Validitas dan Keandalan Data

Untuk memastikan validitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber (wawancara dengan berbagai pihak), triangulasi metode (wawancara, observasi, dokumentasi), dan member check, yaitu meminta konfirmasi kepada informan terkait temuan sementara (Ahmad et al., 2025).

f. Etika Penelitian

Penelitian ini mengikuti prinsip etika penelitian kualitatif, termasuk meminta persetujuan informan (informed consent), menjaga kerahasiaan identitas, serta memastikan data digunakan hanya untuk kepentingan penelitian akademik. Informan memiliki hak untuk menarik diri kapan saja tanpa konsekuensi negatif. Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat Kampung Yasa Mulya serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program pemberdayaan.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Peran Pemerintah Kampung Sebagai Regulator

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kampung Yasa Mulya menjalankan fungsi regulator melalui penyusunan program pemberdayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat kampung. Program yang disusun meliputi dukungan kelompok tani, musyawarah kampung, kegiatan penyuluhan pertanian, serta pengalokasian dana kampung untuk mendukung kegiatan produktif Masyarakat. Implementasi kebijakan ini berperan penting dalam meningkatkan produktivitas masyarakat dan memfasilitasi partisipasi warga dalam pembangunan desa (Fatzrin & Prathama, 2024; Hadi et al., 2024).

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Kampung menjelaskan bahwa: "*Kami berusaha menyusun program berdasarkan kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui musyawarah kampung. Karena sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, maka program pertanian menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan kampung.*" Hasil observasi menunjukkan bahwa proses musyawarah kampung dilaksanakan secara rutin sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat. Selain itu, dokumentasi kampung menunjukkan adanya program pemberdayaan yang dimasukkan dalam dokumen perencanaan kampung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung). Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi regulator telah dijalankan melalui mekanisme perencanaan partisipatif. Fenomena ini terjadi karena karakteristik masyarakat Yasa Mulya yang sangat bergantung pada sektor pertanian sehingga pemerintah kampung cenderung memprioritaskan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Temuan ini sejalan dengan penelitian Saefuloh et al., (2025) yang menyatakan bahwa fungsi regulator pemerintah desa menjadi dasar dalam mengarahkan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara sistematis.

b. Peran Pemerintah Kampung Sebagai Dinamisor

Sebagai dinamisor, pemerintah Kampung Yasa Mulya berupaya mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan melalui sosialisasi, musyawarah kampung, kegiatan gotong royong, dan pelatihan yang diselenggarakan bekerja sama dengan pemerintah distrik maupun instansi terkait. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat, diperoleh informasi bahwa: *"Pemerintah kampung sering mengundang masyarakat untuk mengikuti rapat kampung dan kegiatan pelatihan, tetapi memang tidak semua warga selalu hadir karena sebagian besar bekerja di kebun atau sawah."* Temuan ini diperkuat oleh hasil observasi yang menunjukkan bahwa tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan kampung cukup bervariasi. Sebagian masyarakat menunjukkan partisipasi aktif, sementara sebagian lainnya masih kurang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kesibukan masyarakat sebagai petani yang lebih memprioritaskan aktivitas ekonomi keluarga.

Dalam konteks masyarakat agraris di Merauke, fenomena ini dapat dipahami karena sebagian besar waktu masyarakat terserap untuk kegiatan pertanian, terutama pada musim tanam dan panen. Akibatnya, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kampung sering dipengaruhi oleh kondisi ekonomi rumah tangga dan siklus pertanian yang sedang berlangsung. Meskipun demikian, keberadaan tokoh masyarakat dan aparat kampung menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi warga. Temuan ini mendukung hasil penelitian Nubu dan Mattalitti, (2021) yang menegaskan bahwa peran pemerintah sebagai penggerak masyarakat sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan.

c. Peran Pemerintah Kampung Sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah desa menyediakan sarana dan prasarana, pendampingan teknis, dan pelatihan yang mendukung kegiatan produktif masyarakat. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi sebagian warga, dan kebutuhan pelatihan teknis yang lebih terstruktur menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program (Elastiana et al., 2025; Setiawan, 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kampung Yasa Mulya juga menjalankan fungsi fasilitator melalui penyediaan sarana pendukung, pelatihan, pendampingan, dan koordinasi dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dukungan tersebut terutama diarahkan pada kelompok tani yang menjadi kelompok dominan dalam struktur ekonomi kampung. Salah seorang anggota kelompok tani menyampaikan bahwa: *"Kami pernah mendapatkan bantuan alat pertanian dan mengikuti penyuluhan dari pemerintah kampung bersama petugas pertanian. Bantuan tersebut cukup membantu dalam meningkatkan hasil usaha tani."*

Hasil observasi menunjukkan adanya pemanfaatan fasilitas pertanian oleh masyarakat meskipun belum sepenuhnya menjangkau seluruh kelompok tani. Dokumentasi kegiatan kampung juga memperlihatkan adanya pelaksanaan pelatihan dan kegiatan penyuluhan yang melibatkan masyarakat. Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam jumlah bantuan dan frekuensi pelatihan yang diberikan. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan anggaran kampung yang harus dibagi untuk berbagai kebutuhan pembangunan lainnya, sementara kebutuhan masyarakat terhadap program pemberdayaan terus meningkat. Selain itu, luas wilayah dan sebaran penduduk di wilayah Merauke menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pelayanan pemberdayaan kepada seluruh masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hermawan et al., (2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan fungsi

fasilitator sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya dan dukungan anggaran yang memadai.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan adanya dampak positif dari program pemberdayaan ini. Kelompok tani yang dibentuk memperoleh akses terhadap pelatihan pertanian modern dan modal usaha dari pemerintah desa, sehingga terjadi peningkatan produktivitas dan pendapatan. Kelompok UMKM yang mengikuti pelatihan juga menunjukkan kemajuan dalam hal keterampilan produksi dan manajemen usaha. Selain itu, kegiatan musyawarah desa dan pelatihan partisipatif meningkatkan pemahaman warga mengenai peran serta mereka dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Data dokumentasi memperlihatkan bahwa kegiatan tersebut rutin dilakukan sesuai jadwal program pemerintah desa dan didukung oleh dokumen resmi, termasuk laporan keuangan dan notulen musyawarah (Fatzrin & Prathama, 2024; Hadi et al., 2024; Setiawan, 2024). Temuan penelitian juga mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat. Faktor pendukung mencakup dukungan penuh dari aparat desa, koordinasi yang baik antara lembaga lokal dan masyarakat, serta ketersediaan beberapa sumber daya lokal. Faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, rendahnya minat beberapa warga untuk berpartisipasi, serta akses infrastruktur yang belum merata. Meskipun begitu, upaya swadaya masyarakat dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten membantu mengurangi hambatan tersebut (Elastiana et al., 2025).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa di Kampung Yasa Mulya cukup optimal dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat melalui program pemberdayaan yang terstruktur. Temuan ini memberikan dasar bagi pengembangan strategi pemberdayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga lokal, dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan desa yang inklusif dan partisipatif (Elastiana et al., 2025; Fatzrin & Prathama, 2024; Hadi et al., 2024; Setiawan, 2024).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kampung Yasa Mulya telah menjalankan perannya dalam pemberdayaan masyarakat melalui fungsi regulator, dinamisator, dan fasilitator. Sebagai regulator, pemerintah kampung berperan dalam menyusun kebijakan dan program yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, khususnya pada sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat kampung. Sebagai dinamisator, pemerintah kampung berupaya mendorong partisipasi masyarakat melalui musyawarah kampung, sosialisasi program, dan berbagai kegiatan pemberdayaan. Sementara itu, sebagai fasilitator, pemerintah kampung menyediakan dukungan berupa pelatihan, pendampingan, serta bantuan sarana yang mendukung peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat didukung oleh adanya koordinasi yang baik antara pemerintah kampung, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat, serta didukung oleh potensi sumber daya lokal yang tersedia. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas program pemberdayaan, antara lain keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, keterbatasan sarana pendukung pertanian, dan belum meratanya akses terhadap kegiatan pelatihan dan pendampingan. Dalam konteks wilayah agraris seperti Kampung Yasa Mulya, keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah kampung dalam mengintegrasikan

kebijakan, partisipasi masyarakat, dan dukungan fasilitas secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah kampung perlu memperkuat kolaborasi dengan pemerintah distrik, pemerintah kabupaten, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna meningkatkan kualitas program pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap kajian pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan Papua Selatan serta dapat menjadi referensi bagi pemerintah kampung dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas program pemberdayaan masyarakat menggunakan pendekatan yang lebih luas dengan melibatkan berbagai kampung atau distrik sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pemberdayaan masyarakat di wilayah Papua Selatan.

5. Daftar Pustaka

- Ahmad, A., Ratna, K. A., & Daryono, D. (2025). Social Construction : The Role of Community Empowerment Institutions (LPM) in the Village Fund-Based Development Process. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 7(2), 313–329. <https://doi.org/10.47650/jglp.v7i2.2302>
- Elastiana, N., Salim, L., & Muttaqin, A. (2025). Integrating Social Capital Into Rural Empowerment: A Case Study of The Empowered Village Program in Lampung. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 14(4), 657–678.
- Fatzrin, D., & Prathama, A. (2024). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedungwonokerto Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(2), 97–103. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i2.3774>
- Hadi, S., Marta, A., Amin, R. M., & Febrina, R. (2024). Rural Development in Community Empowerment Through the Governance of Village-Owned Enterprises (BUMDes). *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 23(1), 121–134. <https://doi.org/10.35967/njip.v23i1.702>
- Hermawan, E., Pebriyani, D., Julianty, D. N., Safitri, F., & Laksono, G. T. (2021). Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tirtawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1).
- Maharani, D. N., & Asmorowati, S. (2024). Community Empowerment dalam Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Desa Ketapanrame Sebagai Desa Wisata. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 10(3), 249–260. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2024.010.03.2>
- Nubu, A., & Mattalitti, M. I. (2021). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Lokal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal*, 1(2), 77–99.
- Saefuloh, S., Sukmapryandhika, D., & Rohayatin, T. (2025). Peranan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat di Kampung Cikondang Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. *Praxis Idealist: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 1(3). <https://doi.org/10.36859/jp.v1i3.4145>
- Sarman, S., Tohopi, R., & Nani, Y. N. (2025). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi Maluku Utara. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(9), 117–121. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15301448>
- Setiawan, A. (2024). The Role of Village Government in Digital-Based Community Empowerment in Tourism Villages. *Journal of Governance*, 9(3), 461–475. <https://doi.org/10.31506/jog.v9i3.28017>
- Takdir, S., & Wetapo, W. (2025). Kinerja Pemerintah Daerah dalam Menangani Retribusi Terminal : Studi Kasus Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua Pegunungan. *JEINSA : Jurnal Ekonomi Ichsan Sidenreng Rappang*, 4(1), 235–244.

<https://doi.org/10.61912/jeinsa.v4i1.172>

Wahyudin, W., Kuswana, D., & Herdiana, D. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(1), 63–82.